

Evaluation of the Implementation of APIP Inspectorate General of the Kemendikbudristek Roles in Risk Management of Y Social Aid Program

Wahyu Kartika Wijayanti¹

Dyah Setyaningrum²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences: kartika.wijayanti0101@gmail.com

ABSTRACT

This research is conducted to evaluate the implementation the role of the Kemendikbudristek Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the implementation of risk management for the Y Social Aid Program. The research was conducted using a qualitative method with a case study approach on the supervisory activities of APIP in the Y Social Aid Program from 2021 to 2024. Research data was collected through questionnaires, interviews, and document reviews, and then evaluated based on relevant regulations on risk management applicable in government institutions. The results showed that the Kemendikbudristek's APIP has not adequately performed its role in Y Social Aid Program risk management, and has not been able to provide a sufficient assurance on the implementation of risk management. Research on the implementation of the APIP's role in risk management in overseeing government social assistance programs is still rare, and thus can contribute to the risk management of government social assistance programs.

Keywords: Risk Management; Government Internal Audit; Social Aid

Evaluasi Pelaksanaan Peran APIP Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Dalam Manajemen Risiko Program Bantuan Sosial Y

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemendikbudristek dalam manajemen risiko pelaksanaan Program Bantuan Sosial Y. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atas aktivitas pengawasan APIP pada Program Bantuan Sosial Y tahun 2021-2024. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan penelaahan dokumen, kemudian dievaluasi berdasarkan regulasi terkait manajemen risiko yang berlaku di instansi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP Kemendikbudristek belum melaksanakan perannya dalam manajemen risiko Program Bantuan Sosial Y dengan memadai, serta belum dapat memberikan jaminan memadai atas implementasi manajemen risiko. Penelitian mengenai pelaksanaan peran manajemen risiko APIP dalam mengawal program bantuan sosial pemerintah masih jarang dilakukan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam manajemen risiko program bantuan sosial pemerintah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko; Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Bantuan Sosial

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 8
Denpasar, 30 Agustus 2025
Hal. 2211-2228

DOI:

10.24843/EJA.2025.v35.i08.p03

PENGUTIPAN:

Wijayanti, W. K., & Setyaningrum, D. (2025). Evaluation of the Implementation of APIP Inspectorate General of the Ministry of ABC Roles in Risk Management of Y Social Aid Program.

E-Jurnal Akuntansi,
35(8), 2211-2228

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
26 Mei 2025

Artikel Diterima:
1 Agustus 2025

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2014 pemerintah meluncurkan tiga program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Sosial Y yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kemendikbudristek diamanatkan untuk membayarkan manfaat program kepada penerima program dengan efektif dan efisien. Akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LHP LK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kemendikbudristek tahun 2019 s.d 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) BPK atas Pengelolaan Program Bantuan Sosial Y tahun 2020, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan program yang mengakibatkan potensi timbulnya kerugian negara. Tabel 1 merangkum permasalahan dalam pengelolaan dana program Bantuan Sosial Y yang ditemukan oleh BPK serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

Tabel 1. Permasalahan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Y dan Potensi Kerugian Negara yang Ditimbulkan

Laporan	Temuan	Jumlah Potensi Kerugian Negara (dalam juta rupiah)				
		2019	2020	2021	2023	Total
LHP BPK atas LK Kemendikbud Tahun 2019 s.d 2023	1 Duplikasi data	-	58,1	-	-	58,1
	2 Tidak tepat jumlah penyaluran bantuan	4.675,3	-	-	-	4.675,3
	3 Kelemahan verifikasi data	5.592,9	366.567,2	-	4.821,6	376.981,7
	4 Saldo mengendap di Bank Penyalur	-	1.180.452,3	654.838,1	325,3	1.835.615,7
	5 Penerima ganda	-	600,1	168.810,4	-	169.410,5
LHP PDDT BPK atas Program Bantuan Sosial Y Kemendikbud Tahun 2020	1 Potensi penerimaan jasa giro tidak dapat ditagih	-	167.901,8	-	-	167.901,8
	2 Penyaluran tidak tepat jumlah	-	343.172,6	-	-	343.172,6
	3 Data penerima ganda	-	3.078,3	-	-	3.078,3
	4 Duplikasi penerima namun berbeda jenjang	-	174.556,4	-	-	174.556,4
	5 Saldo mengendap di Bank Penyalur	-	1.982.776,7	-	-	1.982.776,7
Total		10.268,3	4.219.163,6	823.648,4	5.146,9	5.058.227,1

Sumber: Diolah dari LHP BPK atas LK Kemendikbudristek Tahun 2019 s.d 2023 dan LHP DTT BPK atas Pengelolaan Bantuan Sosial Y Tahun 2020

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Sosial Y, dan anggaran yang dikelola digunakan dengan tepat, akuntabel, dan tidak disalahgunakan, Kemendikbudristek melalui Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas pelaksanaan program tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa keefektifan peran APIP tidak hanya tercermin dari kemampuan pengawasannya untuk memberikan jaminan yang cukup atas kepatuhan, penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Namun demikian, APIP Kemendikbudristek nampaknya belum dapat menjalankan perannya dengan optimal untuk dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada pelaksanaan Program Bantuan Sosial Y. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 diketahui bahwa setiap tahunnya APIP melaksanakan pengawasan atas Program Bantuan Sosial Y dalam bentuk kegiatan audit dan pemantauan terkait program, namun belum ditemukan kegiatan terkait manajemen risiko atas pelaksanaan program. Adapun aktivitas terkait manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP adalah berupa *review* dan evaluasi atas implementasi manajemen risiko pada tingkat satuan kerja, belum spesifik pada manajemen risiko program. Belum optimalnya peran APIP dalam pengawasan implementasi manajemen risiko juga diungkapkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Kapabilitas Mandiri APIP tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LHE tersebut menilai bahwa APIP belum mampu menjadi mitra strategis Kementerian. Hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (*Governance, Risk, and Control/GRC*) belum menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara berkelanjutan. Atas hasil tersebut APIP Kemendikbudristek disarankan untuk mengintegrasikan informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, melakukan *review* dan pemantauan secara memadai terhadap risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko, melakukan kegiatan pengawasan atas GRC, dan mengevaluasi pedoman serta pelaksanaan pengawasan atas GRC secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mewajibkan instansi pemerintah melaksanakan manajemen risiko melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan adaptasi dari kerangka pengendalian internal *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (Carolina & Tobing, 2023). COSO *Internal Control – Integrated Framework* (2013) memiliki 5 komponen pengendalian internal yang kemudian diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi 5 unsur pengendalian internal, yaitu *control environment, risk assessment, control activities, information & communication, dan monitoring activities* (COSO, 2013). Penilaian risiko (*risk assessment*) yang merupakan salah satu unsur dari SPIP secara tidak langsung mengharuskan setiap Kepala Instansi Pemerintah mengimplementasikan manajemen risiko serta menjadikan kemampuan APIP sebagai pendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko sebagai alat ukur efektivitas pelaksanaan peran pengawasannya. Kewajiban Kepala Instansi Pemerintah terutama bagi APIP untuk mengimplementasikan manajemen risiko diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala (Perka) BPKP No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). PIBR mengintegrasikan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko organisasi dan bertujuan memberikan keyakinan yang independen dan objektif bahwa risiko telah dikelola dengan baik serta tidak mengganggu pencapaian organisasi.

Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur peran APIP dalam implementasi manajemen risiko yang diadopsi dari peran audit internal dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) pada *IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management*. IIA membagi peran audit internal

dalam ERM menjadi 3 kelompok besar, diilustrasikan dalam bentuk kipas peran audit internal pada Gambar 1.



Gambar 1. Internal Auditing Role's in ERM

Sumber: IIA Position Paper: *The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management*

Aktivitas-aktivitas bagian kiri kipas pada Gambar 1 merupakan aktivitas assurance yang harus diperankan APIP dalam ERM yaitu menyediakan keyakinan memadai (*assurance*). Aktivitas bagian tengah kipas merupakan peran konsultasi yang boleh dilakukan oleh auditor internal namun pelaksanaannya memerlukan pertimbangan memadai untuk memastikan independensi dan obyektivitas auditor internal tetap terjaga. Sedangkan aktivitas bagian kanan kipas adalah peran yang tidak boleh dilakukan oleh auditor internal karena dapat mengancam independensi dan obyektivitasnya ketika melaksanakan penugasan lainnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyoroiti pelaksanaan peran auditor internal dalam manajemen risiko organisasi beserta dampaknya. Pada konsep ERM, auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap ERM (Keffner, Ryan B. Lee, & McGannon, 2003). Namun intensitas keterlibatannya dalam ERM berbanding terbalik dengan obyektivitasnya ketika melaksanakan tugas lainnya (Zwaan, Stewart, & Subramaniam, 2011; Kertali & Tahajuddin, 2018). Auditor internal telah mengambil peran dalam pengembangan ERM dalam mengidentifikasi dan menangani risiko, namun masih berperan kecil dalam menganalisis, menetapkan, dan meninjau ulang risiko belum dapat menjalankan peran mengambil peran manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan menangani risiko (Mardessi & Arab, 2018). Hasil serupa juga diperoleh pada penelitian terhadap peran audit internal dalam ERM pada sektor publik di Indonesia, baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah. Hasil penelitian pada dua BUMN yang bergerak pada sektor berbeda, memberikan kesimpulan bahwa fungsi manajemen risiko belum dapat diperankan secara optimal oleh internal auditor, perusahaan belum mampu mengelola dan memitigasi risiko yang berakibat pada kerugian perusahaan (Simarmata & Supriyono, 2023; Simatupang & Bayangkara, 2023). Sementara itu penelitian di instansi pemerintahan memberikan hasil bahwa APIP belum menjalankan perannya secara efektif dalam memberikan keyakinan atas implementasi manajemen risiko dan juga belum menjalankan peran intinya dalam

penerapan manajemen risiko sesuai regulasi yang berlaku (Pramesti, 2014; Eda & Tobing, 2020; Carolina & Tobing, 2022; Sembiring, 2024).

Sehubungan dengan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penggunaan sumber daya pajak, pemerintah perlu memberikan perhatian yang memadai harus pada manajemen risiko (Halachmi, 2003). Oleh karena itu selain penting untuk memastikan manajemen risiko instansi telah dijalankan dengan optimal, peran APIP yang efektif dalam manajemen risiko juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan risiko korupsi di instansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko pelaksanaan program Bantuan Sosial Y dan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan untuk mengoptimalkan peran APIP Kemendikbudristek dalam manajemen risiko. Adapun keterbaruan dari penelitian ini adalah, penelitian ini mengevaluasi peran APIP dalam manajemen risiko pada pelaksanaan program bantuan sosial, menganalisis pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko dan kemampuannya memberikan jaminan memadai atas implementasi manajemen risiko, serta melibatkan pengelola program sebagai responden dan narasumber untuk mengonfirmasi hasil evaluasi. Selain diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan peran manajemen risiko oleh APIP dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Y sekaligus menjadi perbaikan proses kerja APIP, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang manajemen risiko di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell & Creswell (2023) menyatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Pendekatan studi kasus yang digunakan pun akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan analisis secara lebih mendalam mengenai proses tertentu berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan studi kasus evaluasi, yaitu untuk dapat menggambarkan situasi melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai individu, organisasi, strategi, dan kebijakan tertentu sebelum keputusan atau tindakan penting lainnya diambil (Ellet, 2018). Unit kerja yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Inspektorat A yang merupakan unit kerja eselon 2 pada Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial Y. Dengan ruang lingkup penelitian adalah aktivitas pengawasan terkait program Bantuan Sosial Y yang dilakukan oleh APIP selama tahun 2021-2024. Penelitian ini menggunakan 2 tipe data, yaitu data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara narasumber, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari analisis peraturan terkait manajemen risiko serta dokumentasi hasil pelaksanaan pengawasan program Bantuan Sosial Y.

Kuesioner penelitian berisikan 67 pernyataan yang dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Bagian pertama terdiri dari 12 pernyataan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peran yang harus dilaksanakan oleh APIP dalam

manajemen risiko. Bagian kedua terdiri dari 11 pernyataan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peran yang boleh dilaksanakan oleh APIP dalam manajemen risiko dengan pertimbangan memadai. Bagian ketiga terdiri dari 6 pernyataan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peran yang tidak boleh dilaksanakan oleh APIP dalam manajemen risiko. Pernyataan bagian pertama hingga ketiga ini dikembangkan dari Permendikbud No 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemendikbud, Perka BPKP No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PIBR, dan Perka BPKP No 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BPKP. Sedangkan pernyataan bagian keempat terdiri dari 38 pernyataan, bertujuan mengevaluasi kemampuan APIP dalam memberikan jaminan memadai atas implementasi manajemen risiko program Bantuan Sosial Y, pada 5 area penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) berdasarkan Perka BPKP No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perka tersebut mengevaluasi kualitas penerapan manajemen risiko dengan menggunakan kerangka kerja SPIP, sehubungan dengan adanya kesamaan substansial antara penyelenggaraan SPIP secara utuh dengan kerangka kerja dan proses manajemen risiko SNI ISO 31000:2018 yang diadaptasi dari ISO 31000:2018. Kuesioner disebarkan dalam bentuk digital (*Google Form*) maupun tercetak (*print out*) kepada 69 orang calon responden, terdiri dari 57 orang populasi APIP yang melakukan pengawasan program Bantuan Sosial Y pada tahun 2021 s.d 2024 dan 12 orang lainnya merupakan populasi manajemen pengelola program di tingkat kementerian yang terlibat langsung dalam implementasi manajemen risiko program Bantuan Sosial Y. Penggunaan kuesioner sebelum dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran APIP dan kemampuannya dalam menjalankan peran manajemen risiko.

Pengukuran isian kuesioner dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan rentang skala 1-5, yang merepresentasikan jawaban "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju". Penggunaan Skala Likert 5 poin dipilih dengan mempertimbangkan opsi respons 5 poin memiliki keunggulan dibandingkan dengan kategori respons 3 poin, tetapi tidak menimbulkan kelemahan yang signifikan dibandingkan dengan kategori respons 7 poin (Aybek & Toraman, 2022). Hasil isian kuesioner dapat dianalisis dengan menghitung skor gabungan (jumlah atau rata-rata) seluruh respon dari pertanyaan yang ada, kemudian diukur dengan menggunakan skala interval (Boone & Boone, 2012). Skala interval dibuat dengan membagi rentang nilai antar kategori respon sama besar dan konstan (Pimentel, 2010), seperti yang dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Interpretasi Kualitatif Pengukuran Skala Likert 5 Poin

Deskripsi Skala Likert	Skala Likert	Interval Skala Likert
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Sangat Negatif	1	1,00 - 1,79
Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Negatif	2	1,80 - 2,59
Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral	3	2,60 - 3,39
Setuju/Sering/Positif	4	3,40 - 4,19
Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif	5	4,20 - 5,00

Sumber: A Note on the Usage of Likert Scaling for Research Data Analysis (Pimentel, 2010)

Wawancara dilakukan setelah hasil analisis kuesioner diperoleh, untuk mengetahui hal-hal lebih mendalam dari responden sekaligus mengkonfirmasi hasil analisis kuesioner yang telah diperoleh. Proses wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan bebas tanpa pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis (Sekaran & Bougie, 2016). Seluruh pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber merupakan pengembangan dari pertanyaan kuesioner dan hasil analisis isian kuesioner yang diperoleh, terutama pada pernyataan yang memperoleh skor rata-rata paling rendah di setiap bagian pernyataan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 8 orang perwakilan APIP Kemendikbudristek yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Bantuan Sosial Y selama tahun 2021-2024 dan 2 orang perwakilan pengelola program Bantuan Sosial Y di tingkat kementerian, dengan kriteria Memiliki kapabilitas dan kompetensi baik dari segi akademik maupun pengalaman yang memadai; Dipilih dari setiap peran dalam penugasan dan masa kerja yang dapat mewakili populasi (representatif); Mengisi kuesioner yang disebarakan.

Adapun Informasi mengenai latar belakang narasumber dalam penelitian ini dapat dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Narasumber Penelitian

No	Kode	Jabatan	Masa Kerja	Peran Narasumber dalam Pengawasan/Pengelolaan
1	PM1	Auditor Utama	lebih dari 20 tahun	- Pengendali Mutu kegiatan pengawasan internal - Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
2	PT 1	Auditor Ahli Madya	19 tahun	- Pengendali Teknis kegiatan pengawasan internal - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
3	PT2	Auditor Ahli Madya	Lebih dari 20 tahun	- Pengendali Teknis kegiatan pengawasan internal - Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
4	KT1	Auditor Ahli Muda	16 tahun	- Ketua Tim kegiatan pengawasan internal - Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
5	KT2	Auditor Ahli Muda	17 tahun	- Ketua Tim kegiatan pengawasan internal
6	KT3	Auditor Ahli Muda	16 tahun	- Ketua Tim kegiatan pengawasan internal - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
7	AT1	Auditor Ahli Pertama	6 tahun	- Anggota Tim kegiatan pengawasan internal - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
8	AT1	Auditor Ahli Pertama	6 tahun	- Anggota Tim kegiatan pengawasan internal - Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan - Pengampu unit kerja pengelola program Bantuan Sosial Y
9	MP1	Analisis Teknis Kebijakan	lebih dari 20 tahun	Penyusun teknis dan pelaksana kebijakan program Bantuan Sosial Y pada tingkat kementerian
10	MP2	Penelaah Teknis Kebijakan	lebih dari 20 tahun	

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dengan melibatkan pengelola program Bantuan Sosial Y pada tingkat kementerian sebagai narasumber penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan lengkap dari dua sisi yang berbeda. Sedangkan

tujuan dari pemilihan narasumber berdasarkan perannya dalam pengawasan adalah agar informasi yang diperoleh dapat mencakup seluruh peran dalam pengawasan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko program Bantuan Sosial Y, untuk dibandingkan dengan kondisi ideal seperti yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015 dan Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2018, Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2021 dan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis lebih rinci dari hasil isian kuesioner yang diperoleh untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang telah disusun, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas atas kuesioner untuk meyakini kelayakan kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Validitas kuesioner berhubungan dengan kesesuaian kuesioner yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden, sedangkan reliabilitas kuesioner berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran dengan menggunakan kuesioner tersebut jika dilakukan secara berulang (Sekaran & Bougie, 2016). Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan atas keandalan instrumen yang digunakan, dilakukan pengujian validitas dengan teknik *Corrected Item- Total Correlation* dan pengujian reabilitas *Cronbach's alpha test* atas kuesioner dengan menggunakan SPSS pada tingkat signifikansi sebesar 5%.

Pengujian validitas pada teknik *Corrected Item-Total Correlation* dilakukan dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* sebagai r hitung dengan r tabel *product moment* berdasarkan nilai *degree of freedom* (df) yang digunakan dalam penelitian. Jika nilai r hitung $> r$ tabel *product moment* ($n-2$), maka butir soal kuesioner adalah valid, namun jika r hitung $< r$ tabel *product moment*, maka butir soal tidak valid (Raharjo, 2019). Sedangkan pengujian realibilitas dengan *Cronbach's alpha test* ditentukan berdasarkan nilai *Cronbach's alpha*, jika nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$, maka kuesioner dinyatakan reliabel, namun jika nilai *Cronbach's alpha* $< 0,60$, kuesioner dinyatakan tidak reliabel (Sekaran & Bougie, 2016).

Pengujian validitas menghasilkan nilai *Corrected Item- Total Correlation* (r hitung) untuk setiap butir pernyataan berada pada rentang nilai 0,720-0,966 dan lebih besar dari nilai r tabel *product moment* ($n-2$), yaitu 0,254. Sedangkan pengujian reabilitas *Cronbach's alpha test* menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,992 yang lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian adalah valid untuk mengukur capaian yang diharapkan, dan instrumen kuesioner yang digunakan mampu memberikan kualitas hasil yang konsisten (reliabel), sehingga analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan konsisten, menghasilkan simpulan penelitian yang tepat, serta rekomendasi tindakan perbaikan yang membangun.

Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan diisi secara online melalui *digital form* yang tautannya disampaikan melalui media sosial *whatsapp*, dan secara

tercetak (*print out questionnaire*), untuk mengoptimalkan perolehan respon. Kuesioner disebarakan kepada populasi APIP yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Bansos Y pada periode tahun 2021 – 2024 dan populasi pengelola program Bansos Y dengan rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Penyebaran Kuesioner

Keterangan	APIP	Responden Pengelola Program	Total
Metode penyebaran dan pengisian Kuesioner			
- <i>Digital Form</i>	57	10	67
- <i>Print Out Questionnaire</i>	-	2	2
Total kuesioner yang disebar	57	12	69
Kuesioner yang direspon	50	12	62
Kuesioner yang tidak direspon	7	-	7
Kuesioner yang digunakan	50	12	62
<i>Responses rate</i>	87,72%	100%	89,85%

Sumber: Data Penelitian, 2025

Melalui tabel dapat diketahui bahwa jumlah responden APIP tidak mencakup seluruh populasi, dari 57 orang populasi APIP hanya 50 orang yang bersedia dilibatkan dalam penelitian. Namun demikian jika dihitung dengan menggunakan rumus Sloven (Altare, et al., 2003) dengan confidence level 5%, tersebut telah memenuhi jumlah sampel minimal yang diperlukan. Berikut perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{57}{1+57(0,05)^2} = 49,87 = 50 \dots \dots \dots (1)$$

n = ukuran sampel

N= jumlah populasi = 57

e = margin of error (5% atau 0,05)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Sloven untuk jumlah populasi sebanyak 57 orang dan sampling error 5%, maka dibutuhkan sampel setidaknya sebanyak 50 orang. Tabel 5 merangkum komposisi responden berdasarkan jabatan dan perbandingannya dengan populasi jumlah APIP yang melakukan pengawasan pada pelaksanaan program Bantuan Sosial Y selama tahun 2021-2024.

Tabel 5. Komposisi Responden APIP (Sampel Penelitian) Berdasarkan Jabatan Dibandingkan dengan Komposisi Populasi APIP

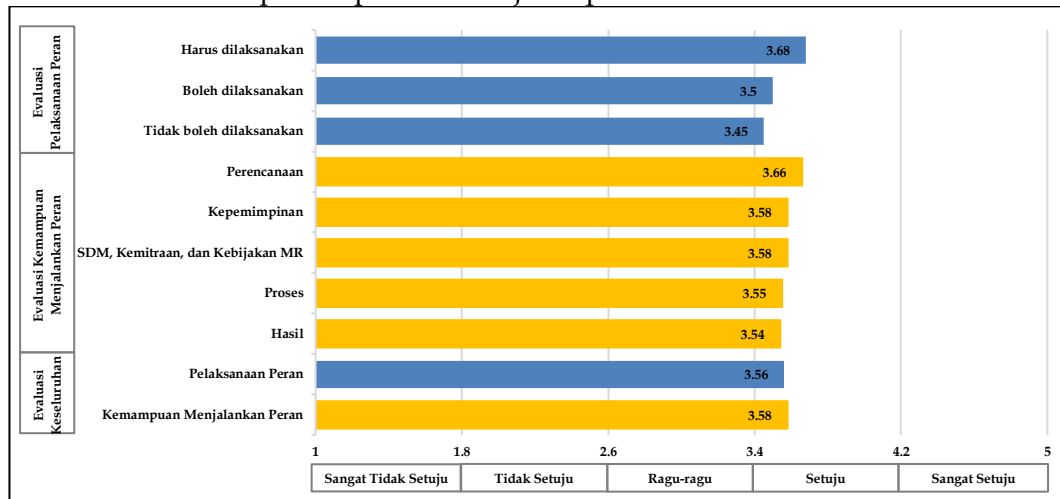
No	Jabatan	Jumlah Sampel	Jumlah Populasi	% Sampel
1	Auditor Utama	2	3	66,67%
2	Auditor Ahli Madya	14	16	87,50%
3	Auditor Ahli Muda	16	19	84,21%
4	Auditor Ahli Pertama	18	19	94,74%
Total		50	57	87,72%

Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa responden APIP yang menjadi sampel dalam penelitian telah dapat mewakili populasi APIP yang melakukan pengawasan pelaksanaan program Bantuan Sosial Y selama tahun 2021-2024.

Secara umum butir-butir pernyataan dalam kuesioner disusun untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan peran manajemen risiko APIP dalam implementasi manajemen risiko program Bantuan Sosial Y serta mengukur kemampuan APIP dalam menjalankan peran. Analisis atas hasil isian kuesioner

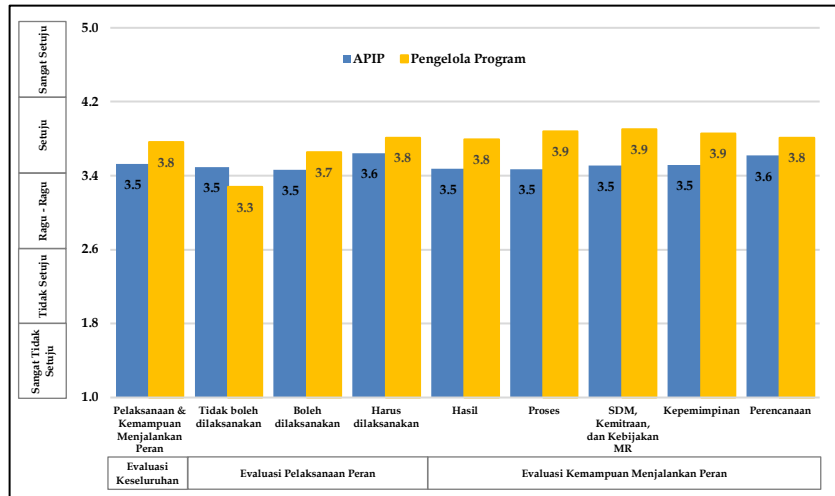
dilakukan terhadap jawaban responden baik secara keseluruhan maupun parsial berdasarkan kelompok responden. Hasil isian kuesioner responden secara keseluruhan disajikan pada Gambar 2, sedangkan hasil isian kuesioner berdasarkan kelompok responden disajikan pada Gambar 3.



Gambar 2. Hasil Survei Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan Peran APIP dalam Manajemen Risiko Program Bantuan Sosial Y

Sumber: Data Penelitian, 2025

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa rata-rata skor yang diberikan seluruh responden untuk rangkaian pernyataan yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko Program Bantuan Sosial Y adalah 3,56. Sedangkan rata-rata skor yang diberikan untuk rangkaian pernyataan yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan APIP dalam memberikan jaminan memadai atas implementasi manajemen risiko pada Program Bantuan Sosial Y adalah 3,58. Dengan mengacu pada Tabel 2, kedua rata-rata skor tersebut berada pada kategori respon "Setuju". Namun demikian, skor tersebut belum sepenuhnya dapat dinilai sebagai "Setuju", karena masih cenderung mendekati kategori "Ragu-ragu". Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan dalam penilaian (*scoring*) yang diberikan oleh responden, dan tingkat persetujuan yang diberikan oleh responden masih lemah. Oleh karena itu berdasarkan hasil isian kuesioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara umum responden belum sepenuhnya menyetujui bahwa APIP telah melaksanakan perannya dalam manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku dan APIP belum sepenuhnya mampu untuk memberikan jaminan memadai atas implementasi manajemen risiko pada program Bantuan Sosial Y.



Gambar 3. Hasil Survei Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan Peran APIP dalam Manajemen Risiko Program Bantuan Sosial Y Berdasarkan Kelompok Responden

Sumber: Data Penelitian, 2025

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa responden dari kelompok pengelola program memberikan skor lebih tinggi disetiap butir pernyataan dalam kuesioner dibandingkan dengan penilaian yang diberikan oleh APIP. Rata-rata skor yang diberikan oleh responden APIP adalah 3,53, sedangkan rata-rata skor yang diberikan oleh responden pengelola program adalah 3,76. Namun demikian kedua rata-rata skor tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini berdasarkan hasil pengujian beda rata-rata skor dengan menggunakan *Independent Sample T-test* yang menghasilkan nilai sig (2 tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu adalah 0,368. Nilai sig (2 tailed) yang lebih besar dari signifikan level 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata kedua kelompok penelitian (Jaggia & Kelly, 2019).

Analisis hasil kuesioner juga dilakukan terhadap skor rata-rata dan kategori respon yang diberikan responden, berdasarkan jabatan responden, untuk mengetahui kecenderungan penilaian setiap kelompok responden mengenai pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko. Rangkuman skor rata-rata responden dari setiap kelompok jabatan responden disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Skor Rata-Rata Responden

Kelompok Responden	Skor Rata-Rata		Total
	< 4	>= 4	
APIP	36 (58,1%)	14 (22,6%)	50 (80,6%)
a. Auditor Ahli Pertama	14 (22,6%)	4 (6,5%)	18 (29,0%)
b. Auditor Ahli Muda	10 (16,1%)	6 (9,7%)	16 (25,8%)
c. Auditor Ahli Madya	10 (16,1%)	4 (6,5%)	14 (22,6%)
d. Auditor Utama	2 (3,2%)	-	2 (3,2%)
Pengelola Program	7 (11,3%)	5 (8,1%)	12 (19,4%)
Total	43(69,4%)	19 (39,6%)	62 (100,0%)

Sumber: Data Penelitian, 2025

Melalui Tabel 6 diketahui bahwa sebagian besar responden dari setiap kelompok jabatan, memberikan skor pernyataan dalam kuesioner rata-rata kurang dari empat. Dan secara total jumlah responden yang memberikan skor rata-rata < 4 lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memberikan skor rata-rata > 4, yaitu sebanyak 43 orang atau 69,4% dari total responden. Hal menunjukkan bahwa keraguan atas pelaksanaan peran dan kemampuan APIP dalam memberikan jaminan memadai sehubungan dengan perannya dalam manajemen risiko program Bantuan Sosial Y terjadi di seluruh kelompok jabatan responden.

Analisis secara detail dilakukan atas pelaksanaan peran APIP yang harus dilaksanakan, boleh dilaksanakan dengan pertimbangan memadai, dan peran yang tidak boleh dilakukan APIP dalam manajemen risiko. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan butir-butir pernyataan terkait peran APIP yang diatur dalam Permendikbud No 66 Tahun 2015, Perka BPKP No 6 Tahun 2018, dan Perka BPKP No 4 Tahun 2021.

Pelaksanaan peran yang harus dilakukan oleh APIP dalam manajemen risiko program Bantuan Sosial Y berkaitan dengan tugas utama APIP untuk memberikan jaminan memadai yang obyektif kepada pimpinan organisasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada program Bantuan Sosial Y. Untuk mengevaluasi pelaksanaan peran ini, terdapat 12 pernyataan dalam kuesioner penelitian yang perlu dinilai kesesuaian pelaksanaan oleh responden. Pernyataan "APIP telah melakukan reviu atas pengelolaan risiko utama program Bantuan Sosial Y, untuk meyakini implementasi pengelolaan risiko utama telah sesuai dengan rencana penanganan yang telah ditetapkan" menjadi pernyataan yang memperoleh skor rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,58. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa selama periode penelitian belum terdapat mekanisme untuk melakukan evaluasi maupun reviu atas risiko utama pada program Bantuan Sosial Y. Pengelola program menyatakan telah melakukan identifikasi risiko program secara terperinci, namun daftar risiko tersebut belum disampaikan kepada APIP sehingga APIP belum dapat melakukan evaluasi maupun reviu atas pengelolaan risiko utama pada program. Secara umum narasumber penelitian baik dari APIP maupun pengelola program cenderung menyetujui bahwa APIP telah melaksanakan peran yang harus dilakukan dalam manajemen risiko program Bantuan Sosial Y, namun belum dilakukan dengan optimal. Pelaksanaan manajemen risiko oleh pengelola yang masih hanya sebagai formalitas untuk pemenuhan kewajiban juga menjadi salah satu faktor yang membuat APIP menilai bahwa pelaksanaan peran ini belum dapat dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan dari manajemen risiko yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Narasumber PT1, yaitu:

"...dari sisi kita karena sebetulnya penerapan manajemen resiko oleh pihak pengelolanya sendiri belum berjalan baik, sehingga kita ya ragu-ragu juga dalam menilai. Tapi ada suatu kewajiban untuk APIP melakukan penilaian gitu ya nah jadi karena di pihak manajemennya juga lebih ke sisi pemenuhan formalitas karena diatur oleh peraturan gitu ya di sisi APIP juga sama pada akhirnya..." (PT1)

APIP Kemendikbudristek juga dinilai belum sepenuhnya melaksanakan perannya dalam manajemen risiko sesuai yang diatur dalam regulasi. Terdapat aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh APIP dalam manajemen risiko, namun belum dilakukan oleh APIP Kemendikbudristek, yaitu mengevaluasi laporan dan

mereviu pengelolaan risiko utama. Selain itu, aktivitas pengawasan terkait manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP terbatas pada *review* dan evaluasi manajemen risiko di tingkat unit kerja eselon 2, belum spesifik terhadap manajemen risiko program. Pengawasan terhadap manajemen risiko program Bantuan Sosial Y dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawasan lainnya

Pelaksanaan peran yang boleh dilaksanakan oleh APIP dalam implementasi manajemen risiko berhubungan dengan peran APIP sebagai *consultant* maupun *catalyst*. Pelaksanaan peran APIP sebagai konsultan dalam manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan tata kelola manajemen, efektivitas manajemen risiko, dan pengendalian internal manajemen. Untuk mengevaluasi pelaksanaan peran ini, terdapat 11 pernyataan dalam kuesioner penelitian yang perlu dinilai kesesuaian pelaksanaan oleh responden. Pernyataan "APIP telah berperan dalam pengembangan kompetensi SDM terkait manajemen risiko pada satuan kerja pengelola program Bantuan Sosial Y" dan pernyataan "APIP telah berperan dalam pembangunan sistem manajemen risiko terintegrasi berbasis aplikasi untuk program Bantuan Sosial Y" menjadi pernyataan yang memperoleh skor rata-rata paling rendah yaitu 3,34. Kurangnya peran APIP dalam pengembangan kompetensi SDM terkait manajemen risiko dan pembangunan sistem manajemen risiko terintegrasi diperkuat oleh hasil wawancara kepada narasumber baik yang berasal dari APIP maupun pengelola program. Narasumber PT1 dan KT1 menyatakan bahwa keterbatasan wewenang dan kompetensi yang dimiliki APIP terkait manajemen risiko membuat APIP tidak mampu berperan banyak dalam pengembangan kompetensi SDM pengelola program. Sedangkan terkait dengan sistem pengembangan manajemen risiko, narasumber MP1 menilai bahwa belum terdapat peran APIP dalam pembuatan maupun pengembangan sistem manajemen risiko dan sistem pengaduan program Bantuan Sosial Y yang saat ini digunakan. Sistem yang ada saat ini dirancang dan dikembangkan atas inisiatif unit kerja pengelola program. Berdasarkan evaluasi, APIP Kemendikbudristek belum berperan aktif dalam berperan sebagai *consultant* maupun *catalyst* dalam proses manajemen risiko program Bantuan Sosial Y dan pembangunan ERM pada unit kerja pengelola program. APIP Kemendikbudristek hanya terlibat pada sebagian kecil kegiatan konsultansi terkait manajemen risiko program Bantuan Sosial Y.

Peran dalam manajemen risiko yang tidak boleh dilakukan oleh APIP merupakan peran yang menjadi tanggung jawab manajemen dan apabila terdapat keterlibatan APIP didalamnya dapat mengganggu obyektivitas dan independensi APIP ketika melaksanakan penugasan lainnya. Konflik kepentingan juga dapat timbul antara APIP dengan pengelola program ketika APIP terlibat dalam hal-hal yang menjadi wewenang manajemen, membuat kepercayaan pengguna laporan hasil pengawasan APIP terhadap efektivitas manajemen risiko program Bantuan Sosial Y menjadi berkurang. Untuk mengevaluasi pelaksanaan peran ini, terdapat 6 pernyataan dalam kuesioner penelitian yang perlu dinilai kesesuaian pelaksanaan oleh responden. Pernyataan "APIP tidak terlibat dalam proses implementasi respon risiko pada program Bantuan Sosial Y milik manajemen" memperoleh skor rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,34. Narasumber PT1 mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan APIP melakukan peran manajemen risiko yang tidak boleh dilakukan, antara lain

keterbatasan akses komunikasi pengelola program di daerah dengan pengelola program kementerian pusat, panjangnya proses yang perlu dilalui untuk menetapkan kebijakan tertentu, maupun adanya perbedaan penilaian risiko tertentu antara APIP dengan pengelola program.

"...Walaupun itu tugas manajemen, tapi penerapan manajemen risiko ini harus jalan. Ya mau nggak mau, tapi kadang-kadang terlibat juga sedikit-sedikit. Tapi ya bukan sebagai utama... Kadang kita harus intervensi gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa diputus. Atau yang sama manajemen dianggap, misalnya, oh ini nggak apa-apa, tapi kita anggap ini nggak boleh, dia nggak masalah, gitu. Jadi, harus ada intervensinya juga, sih..." (PT1)

Sedangkan dari sisi pengelola program narasumber MP1 mengungkapkan bahwa keragu-raguan dalam penilaian responden pengelola program disebabkan oleh kurangnya pemahaman responden terhadap tugas dan tanggung jawab APIP dalam manajemen risiko.

"...bisa jadi teman-teman yang menjawab ragu-ragu itu, karena mereka nggak semuanya tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan APIP dalam manajemen risiko. Karena kan tidak semua staf disini diikutkan di kegiatan manajemen risiko dari APIP..." (MP1)

Terkait dengan kemampuan APIP dalam memberikan jaminan memadai atas aktivitas manajemen risiko yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial Y, evaluasi dilakukan dengan menilai 5 aspek penilaian MRI dalam pelaksanaan penilaian maturitas SPIP terintegrasi yang dituangkan menjadi 38 butir pernyataan. Terdapat 3 pernyataan yang memperoleh skor rata-rata paling rendah sebesar 3,47, yaitu pernyataan "APIP dapat memberikan jaminan memadai bahwa anggota pengelola program Bantuan Sosial Y telah mendapatkan fasilitas untuk meningkat kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko" pada aspek kepemimpinan dan pernyataan "APIP dapat memberikan jaminan memadai bahwa pengelola program Bantuan Sosial Y telah menuangkan seluruh risiko pada program Bantuan Sosial Y yang telah teridentifikasi ke dalam register risiko program Bantuan Sosial Y" serta "APIP dapat memberikan jaminan memadai bahwa pengelola program Bantuan Sosial Y telah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perubahan signifikan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan program Bantuan Sosial Y" pada aspek proses. Pernyataan pertama berkaitan dengan keterbatasan kompetensi APIP terkait manajemen risiko serta wewenang dan kapasitas APIP dalam penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi dan keterampilan pengelola program Bantuan Sosial Y terkait manajemen risiko. Program diklat terkait manajemen risiko yang disediakan oleh kementerian hanya ditawarkan secara terbatas kepada pegawai tertentu, dan pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin. Sedangkan respon yang timbul pada pernyataan kedua dan ketiga disebabkan karena adanya penilaian dari APIP bahwa pengelola program melaksanakan manajemen risiko yang ditetapkan dalam peraturan hanya sebatas formalitas sehubungan dengan adanya peraturan yang mewajibkan pemilik risiko untuk mendokumentasikan tahapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun pada dasarnya pengelola program telah melakukan manajemen risiko dengan caranya tersendiri yang dinilai efektif dan efisien, sesuai dengan karakteristik program Bantuan Sosial Y, kompetensi SDM yang dimiliki, serta budaya kerja organisasi.

"...Secara di atas kertas itu APIP melakukan dan nilainya bagus, tapi kalau ditanya secara apakah itu memang melekat dalam sebuah budaya organisasi terus konsisten diterapkan mulai dari identifikasinya, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring, koordinasi tentang manajemen resiko ini, ya itu enggak juga. Iya jadi lah jadi lebih kepada sisi pemenuhan formalitas. Tapi kalau secara natural naluri manajemen, kalau ditanya nih, apakah program pengelolaan Bantuan Sosial Y ini menerapkan manajemen resiko nggak? Pasti jawabannya 80% pasti diterapkan. Karena apa? Kalau nggak diterapkan, pasti amburadul dong." (PT1)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa APIP Kemendikbudristek belum dapat melaksanakan perannya dalam manajemen risiko program Bantuan Sosial Y dengan memadai, serta belum dapat memberikan jaminan memadai atas implementasi manajemen risiko pada pelaksanaan program. Simpulan ini selaras dengan hasil penelitian terkait peran APIP dalam manajemen risiko di instansi pemerintah yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa APIP belum dapat menjalankan perannya dalam manajemen risiko instansi dengan optimal. Untuk dapat mengoptimalkan peran APIP Kemendikbudristek dalam manajemen risiko program Bantuan Sosial Y, direkomendasikan kepada APIP agar meminta manajemen pengelola program membuat laporan pengelolaan risiko utama sebagai bahan evaluasi dan reviu APIP, melakukan pengawasan terkait manajemen risiko pada pelaksanaan program Bantuan Sosial Y secara spesifik, menjadwalkan aktivitas konsultasi, fasilitasi, maupun sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan terkait manajemen risiko untuk dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan APIP terkait manajemen risiko.

Penelitian ini merupakan eksplorasi awal atas penelitian terkait program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat umum dan masih banyak keterbatasan di dalamnya. Keterbatasan penelitian ini adalah melakukan penelitian secara mendalam atas proses manajemen yang dilakukan oleh pengelola program bantuan di tingkat kementerian (pusat), daerah, maupun organisasi penerima bantuan, belum mempertimbangkan pendapat dari pengelola program di daerah, organisasi penerima bantuan, serta pihak lainnya yang terlibat dalam program Bantuan Sosial Y, dan belum melakukan *benchmarking* dengan APIP instansi pemerintahan lain yang memiliki program bantuan sosial serupa mengenai praktik baik dalam pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian atas proses manajemen risiko pengelola program di tingkat kementerian (pusat), daerah, dan organisasi penerima bantuan, melibatkan pengelola program di daerah, organisasi penerima bantuan, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan Bantuan Sosial Y sebagai responden ataupun narasumber penelitian, dan melakukan *benchmarking* dengan APIP instansi pemerintahan lain yang memiliki program bantuan sosial serupa untuk mendapatkan *best practice* dalam pelaksanaan peran APIP dalam manajemen risiko program bantuan sosial.

REFERENSI

- Altare, P. S., Copo, A. R., Gabuyo, Y. A., Laddaran, A. T., Mejia, L. D., Policarpio, I. A., . . . Yao, A. M. (2003). *Elementary Statistics: A Modern Approach*. Manila: Rex Book Store, Inc.
- Aybek, E. C., & Toraman, C. (2022). How Many Response Categories are Sufficient for Likert Type Scales? An Empirical Study Based on the Item Response Theory. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 9(2), 534-547. <https://doi.org/10.21449/ijate.1132931>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Bantuan Sosial Y Kemendikbudristek dan Instansi Terkait Lainnya*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2021*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2022*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023*.
- Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert Data. *Journal of Extension*, 50(2), doi.org/10.34068/joe.50.02.48.
- BPKP. (2018). *Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko*.
- BPKP. (2021). *Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BPKP*.
- BPKP. (2021). *Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*.
- BPKP. (2023). *Laporan Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kemendikbudristek Tahun 2023*.
- Carolina, Y., & Tobing, A. L. (2023). Evaluasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Manajemen Risiko. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(11), <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i11>.
- COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework: Framework and Appendices*. Durham, North Carolina: American Institute of Certified Public Accountants.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Sixth Edition*. Los Angeles: Sage Publishing.
- Eda, M. T., & Tobing, R. P. (2020). Evaluation of Risk Management Implementation and Inspectorate General's Role in Risk Management (Case Study in The Ministry of X). *5th Proceeding NCAFA, Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference*, 2(2), <https://doi.org/10.31326/.v2i2.794>.
- Ellet, W. (2018). *The Case Study Hand Book: A Student's Guide*. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

- Florentina, H., & Setyaningrum, D. (2024). Evaluasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Manajemen Risiko Pada Inspektorat Kementerian X. *Jurnal Akuntansi Trisakti* (11), 191-216. <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v11i2.18934>.
- Halachmi, A. (2003). Governance and Risk Management: The Challenge of Accountability, Transparency and Social Responsibility. *International Review of Public Administration*, 8(1), 67-76. <https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805018>.
- IIA. (2009). *IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management*. Almonte Springs: The Institute of Internal Auditing.
- Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2021*.
- Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2022*.
- Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2023*.
- Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat A Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2024*.
- ISO. (2018). *Risk management-Guidelines International Standard ISO 31000:2018*. Published in Switzerland.
- Jaggia, S., & Kelly, A. (2019). *Business Statistics Communicating with Numbers 3th Edition*. New York: McGraw-Hill Education.
- Keffner, A. E., Ryan B. Lee, & McGannon, B. (2003). The Effect of Corporate Governance on the Use of Enterprise Risk Management: Evidence From Canada. *Risk Management and Insurance Review*, 6(1), 57-53. <https://doi.org/10.1111/1098-1616.00020>.
- Kertali, M., & Tahajuddin, S. B. (2018). The Effect of Internal Auditors' Involvement in Enterprise Risk Management on Internal Audit Objectivity: Evidence from Malaysia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 6(3), 1-11. DOI: 10.9734/AJEBA/2018/40693.
- Mardessi, S. M., & Arab, S. D. (2018). Internal Audit's Involvement in Risk Management Process. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol 9 No 7, 18-25.
- Pimentel, J. L. (2010). A Note on the Usage of Likert Scaling for Research Data Analysis. *USM R&D Journal* 18 (2), 109-112.
- Raharjo, S. (2019). *SPSS Indonesia*. Retrieved from <https://www.spssindonesia.com/>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach 7th Edition*. West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Simarmata, B. C., & Supriyono, R. (2023). Efektivitas Penerapan Risk Based Internal Auditing dalam Meningkatkan Kualitas Manajemen Risiko (Studi Kasus PT. PLN UIKL Kalimantan). *ABIS: Accounting and Business*

-
- Information Systems Journal*, 11(4), 466-479.
<https://doi.org/10.22146/abis.v11i4.90309>.
- Simatupang, U. S. (2023). Analisis Peran Internal Audit dalam Mengawal Manajemen Risiko. *Muqaddiman: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 135-148. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.93>.
- Zwaan, L. d., Stewart, J., & Subramaniam, N. (2011). Internal Audit Involvement in Enterprise Risk Management. *Managerial Auditing Journal*, <https://doi.org/10.1108/02686901111151323>.